



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Anwar, Moh Arsyad, Sri-Edi Swasono, Iwan Jaya Aziz, Freddy Nazar, Ed., 1988, *Ekonomi Indonesia – Masalah dan Prospek 1988/1989*, UI-Press, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum - Teori, Kritik dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2009, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 Nomor : 25/01/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009*.
- Ernst & Young, 2009, *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Subsidiaries Consolidated Financial Statement With Independent Auditor's Report Year Ended December 31, 2008 and 2007*, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law – Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hadi Moentoro, 1973, *Perusahaan Negara PERJAN, PERSERO dan PERUM*, Biro Sospol dan Hukum Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar akuntansi Keuangan*, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance – Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Lubis, T. Mulya, 1987, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.



- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono ed.**, 1988, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, UI-Press, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N.**, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 - Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Rido, R. Ali, SH.**, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung.
- Sedarmayanti**, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) - Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Jakarta.
- Sugiharto**, 2007, *Peran Strategis BUMN*, PT Gramedia, Jakarta.
- Swasono, Sri-Edi. ed**, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M.**, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum – Teori, Kritik dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang**, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia**, Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 49 tahun 1969 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.
- , Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
- , Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. CV Eka Jaya, Jakarta, 2005.
- , Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- , Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.



- , Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355.
- , Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1998 tentang
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 79.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1998 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 172.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1999 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ked
lam Modal perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara
Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat
Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan
Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2003 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Bank Ekspor Impor Indonesia dan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum
Menggabungkan Diri ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Bank Mandiri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 58.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2003 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank
Mandiri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
59.

3. Koran :

Kompas, Nomor 120, Tahun ke-44, 29 Oktober 2008.

Bisnis Indonesia, 13 Juni 2007.



4. Lain-lain :

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Surat kepada Menteri Keuangan Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal : Permohonan fatwa hukum*, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Risalah Sidang Pleno Mendengar Keterangan Ahli Perkara No.003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945*, Jakarta.

Majelis Eksaminasi, 2006, *Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Surat Dakwaan Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.2068/PID.B/2005/PN.JAKSEL Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan*, Jakarta.

PT Bank Mandiri Tbk., 2008, *Anggaran Dasar – Perubahan kedua puluh enam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No.2 tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-22998, tanggal 4 November 2008.*

PT Garuda Indonesia, 2008, *Anggaran Dasar – Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-60235.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008.*

Rajagukguk, Erman, 2007, *Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*, Makalah pada forum BUMN bertema “Peran BUMN Dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” yang diselenggarakan di Jakarta pada 12-13 April 2007.

Simatupang, Dian Puji N., 2007, *Hak Menguasai Negara Dalam Keuangan Publik – Konsep, Teori dan Praktik*, Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sambutan Menteri Negara BUMN pada pembukaan *Forum BUMN* tanggal 12 April 2007.

<http://www.reformasihukum.org>

<http://antikorupsi.org>